

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Otonomi Daerah 1903-1978*. Bandung: Alumni, 1982.
- Andiyan, et al., *Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- C. Djemabut Blaang, *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Guntur Setiawan. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Henry Maddick, *Desentralisasi Dalam Praktik*. Cetakan I ed. Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh) Hukum*. Denpasar: Jurnal Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Jonaedi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum dan Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Koesoemahatmadja, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan REI Rakasindo, 1997.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Prabawa Utama, *Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Ind-Hill. Co, 1991.
- Pratikno, "Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah", dalam Syamsuddin Haris (editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, Pusat Penelitian Politik LIPI 2003 bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Cetakan Kedua, LIPI Press, Jakarta, 2004.
- Santoso Urip, *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Sudjino, dan D. Udianto, *Manajemen Pemerintah Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, Jakarta: Citra Indah Pratama, 2003.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group Edisi ke -3 Tiga, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Yusnani, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Press, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

JURNAL

Alva Ayu Octavionesti dan Fadjar Hari Mardiansjah. Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. *Jurnal Riptek* Vol. II, No. 1, Tahun 2017

Andarina Aji Pamurti, Dwi Prabowo, "Kajian Kesehatan Lingkungan Permukiman di Kawasan Perdagangan Petudungan Kota Lama Semarang," *Jurnal Planoearth*, Vol.VI No. I, Februari 2021.

Arsandi, Arga S., et al. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Di Kota Semarang." *Jurnal Karya Teknik Sipil S1 Undip*, vol. 6, no. 4, 2017.

Asminar, Asminar. "Tingkat Kesejahteraan Petani Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo." *Jurnal Agri Sains*, vol. 3, no. 1, Jun. 2019, <https://doi.org/10.36355/jas.v3i1.272>.

Dian dan Faiz, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2 (November 2022) <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>

Fahmi dan Ratna. "Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018–2037". *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 2 (Desember 1, 2020) <https://doi.org/10.23960/jpi.v1n2.49>.

- Ismadi Dan Abito Bambang Yuuwono. Posisi Orientasi Bangunan Permukiman Tepi Sungai Pada Pengembangan Potensi Pariwisata Kota (Studi Kasus Permukiman Bantaran Kali Anyar Surakarta). *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* Volume 25 Nomor 2, Juli, 2020.
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, Aminah. Implementasi Desentralisasi Lingkungan Ditengah Pandemi Covid-19 “Antara” Pelestarian Ataupun Pembangunan Berkelanjutan. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Desember 2020.
- Salmon Bihuku, Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1, Januari - Maret, 2018.
- Sri Damayanti, dkk. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Permukiman Kolong Pasupati ke Rusunawa Solokan JerukJURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume. 4 Nomor. 1 Januari 2025 doi: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5028>
- Wahjoerini, Iryan Dwi Handayani, “Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh Kampung Pekojan Semarang,” *Jurnal Planoearth*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2020
- Wijaya, Donny W, “Perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh studi penentuan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 1, Oktober 1, 2016
- Wulansari, Roni, dan Karjuni D. Ma'Ani. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, 22 Jun. 2021, pp. 163-171, doi:10.24036/jmiap.v3i2.208.
- Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, 2016.

- Ariessa Purwidyasari. Policy Brief: Desentralisasi Asimetris Untuk Provinsi Berkarakter Kepulauan. Kemenkeu Learning Center. April 2025
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (21 Januari 2021). Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Diakses pada 2 Desember 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-sp2020-pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (22 April 2024). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk, 2023. Diakses pada 2 Desember 2025, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk.html>
- Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Buku Saku Rumah Layak Huni, 2025
- DISPERKIM Kota Semarang “Rumah Susun”, (Online) <https://disperkim.semarangkota.go.id/index.php/post/read/101/Rumah-Susun> (diakses tanggal 30 Januari 2026)
- DISPERKIM Kota Semarang “Rumah Tidak Layak Huni”, (Online) <https://disperkim.semarangkota.go.id/index.php/post/read/98/Rumah-Tidak-Layak-Huni> (diakses tanggal 30 Januari 2026)
- DISPERKIM Kota Semarang “Tugas Pokok dan Fungsi”, (Online) <https://disperkim.semarangkota.go.id/index.php/post/read/1/Tugas-Pokok-dan-Fungsi> (diakses tanggal 29 Januari 2026)
- JATENGPROV.GO.ID. (Online) [https://jatengprov.go.id/beritadaerah/500-warga-kabupaten-semarang-terima-bsps-kementerian-pupr/#:~:text=Syamsiar%20mengimbau%2C%20satuan%20kerja%20\(satker,dan%2015%20desa%20di%20Tengaran](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/500-warga-kabupaten-semarang-terima-bsps-kementerian-pupr/#:~:text=Syamsiar%20mengimbau%2C%20satuan%20kerja%20(satker,dan%2015%20desa%20di%20Tengaran). Diakses pada tanggal 3 februari 2026)
- PPID “Profil Kota Semarang”, (Online) <https://ppid.semarangkota.go.id/kota-semarang-dalam-angka> (diakses 28 Januari 2026)

RMOLJATENG. Pemerintah Kota Semarang penanganan banjir di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara sebagai bagian dari kawasan revitalisasi Kampung Melayu. (Online)
<https://www.rmoljawatengah.id/kelurahan-dadapsari-jadi-fokus-pemkot-semarang-tangani-banjir#:~:text=Pemerintah%20Kota%20Semarang%20fokus%20penangan an%20banjir%20di,sebagai%20bagian%20dari%20kawasan%20revitalisas i%20Kampung%20Melayu.> (diakses pada tanggal 5 Februari)

SKRIPSI

Nadia Octaviani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar” (Skripsi Fakultas syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022)

Sudibyoy, Alif Reghi, “Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni Oleh Pemerintah Kota Malang” (Skripsi, Malang: Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya, 2016)

Suwito, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai” (Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

WAWANCARA

Setyawan, Dody. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Wawancara. Semarang, 21 Januari 2026.